

**IMPLEMENTASI PEPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

MAKALAH TUGAS AKHIR

**untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya
Informasi Perpustakaan dan Kearsipan**



**RISKALITA
NIM 2020/20026092**

**PROGRAM STUDI INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DEPARTEMEN ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

MAKALAH TUGAS AKHIR

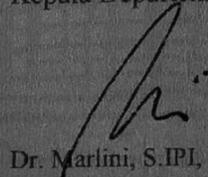
Judul : Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera
Barat
Nama : Riskalita
NIM : 20026092
Program Studi : Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Departemen : Ilmu Informasi dan Perpustakaan
Fakultas : Bahasa dan Seni

Padang, 10 November 2023
Disetujui oleh Pembimbing



Malta Nelisa, S.Sos., M.Hum.
NIP.198307112009122006

Kepala Departemen



Dr. Marlina, S.IPL, MLIS.
NIP.198102102009122005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Riskalita

NIM : 20026092

Dinyatakan lulus setelah mempertahankan makalah di depan Tim Penguji

Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan

Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan

Fakultas Bahasa dan Seni

Universitas Negeri Padang

dengan judul

Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

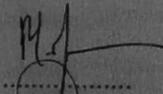
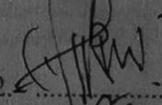
di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Padang, 10 November 2023

Tim Penguji,

Tanda Tangan.

1. Malta Nelisa, S.Sos., M.Hum.
2. Dr. Ardoni, M.Si.
3. Gustina Erlianti, S. Hum., M.IP.

1. 
2. 
3. 

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, dengan judul " Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Di dalam karya ini, tidak terdapat hasil karya atau pendapat orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dan dicantumkan sebagai acuan di dalam makalah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan pada daftar pustaka;
4. Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpanan dari ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa cabutan gelar yang telah saya peroleh karena saya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, November 2023

Saya yang menyatakan



Riskalita

NIM 20026092

ABSTRAK

Riskalita, 2023. “Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat”. *Makalah Tugas Akhir*. Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Padang.

Penulisan makalah ini membahas tentang implementasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) kegiatan pemberdayaan masyarakat; (2) hak mendapatkan layanan perpustakaan secara menyeluruh; (3) aksesibilitas informasi perpustakaan dalam mendukung berjalannya kegiatan inklusi sosial. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan pustakawan, dokumentasi, dan studi pustaka.

Hasil dari pembahasan pada makalah ini mendeskripsikan bagaimana penerapan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membangun perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut: *Pertama*, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diadakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat yang meliputi kegiatan pengembangan potensi diri yang terdiri atas, kelas menjahit, kelas merajut, kelas tahsin, kelas kecantikan kelas bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, hak mendapatkan layanan secara menyeluruh yang meliputi atas akses terhadap sumber informasi. Dimana semua sumber informasi yang berada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, baik itu cetak maupun non-cetak bebas diakses oleh masyarakat tanpa mendapatkan pelayanan yang berbeda. Selanjutnya akses terhadap alat penelusuran informasi yang disediakan baik online maupun *non-online*. *Ketiga*, aksesibilitas informasi perpustakaan yang meliputi tersedianya akses jalan yang memadai, yang bisa digunakan oleh semua pengunjung. Tersedianya perpustakaan keliling yang digunakan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan tersedianya layanan digital perpustakaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah tugas akhir yang berjudul “Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat”. Makalah tugas akhir ini penulis buat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang

Penyusunan makalah ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. (1) Malta Nelisa, S.Sos, M.Hum., selaku dosen pembimbing makalah tugas akhir dan penasehat akademik sekaligus Koordinator Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan; (2) Dr. Ardoni, M.Si. selaku penguji pertama makalah tugas akhir; (3) Gustina Erlianti, S. Hum, M. IP. selaku penguji kedua makalah tugas akhir; (4) Marlina S.IPI, MLIS. selaku Kepala Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan (5) Yelvi Oktavia, S.IP selaku Koordinator Layanan Perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sekaligus sebagai informan data penulisan tugas akhir yang telah membantu dalam penelitian.

Penulis telah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam penulisan makalah tugas akhir ini dan menyadari bahwa makalah tugas akhir ini jauh dari

kata sempurna dan terdapat kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Padang, November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Hakikat Perpustakaan.....	7
2. Perpustakaan Umum	13
3. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.....	15
4. Implementasi	27
F. Metode Penulisan.....	29
1. Jenis Penulisan	29
2. Obyek Kajian	29
3. Pengumpulan Data	29
4. Sistematika Penulisan	31
BAB II PEMBAHASAN	32
A. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	33
1. Kegiatan Pengembangan Potensi Diri.....	34
2. Aspek Pustakawan	50
B. Hak Mendapatkan Layanan Perpustakaan Secara Menyeluruh di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	52
1. Akses Terhadap Sumber Informasi.....	53
2. Akses Terhadap Alat Penelusuran Informasi.....	54
C. Aksesibilitas Informasi Perpustakaan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	56
1. Akses Jalan yang Memadai.....	57
2. Tersedianya Perpustakaan Keliling.....	59
3. Layanan Digital Perpustakaan.....	61
BAB III PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kisi-kisi Wawancara	35
Tabel 2. Contoh Kalimat <i>Tenses</i>	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Cara Mengoperasikan Mesin Jahit	35
Gambar 2. Membuat Pola.....	36
Gambar 3. Memotong Bahan Sesuai Pola.....	38
Gambar 4. Tusuk Rantai.....	39
Gambar 5. Penggunaan Masker Wajah	43
Gambar 6. Pembuatan Alis.....	44
Gambar 7. <i>Speaking Practice</i>	47
Gambar 8. <i>Puzzle Hiragana</i>	48
Gambar 9. Kesenian Origami.....	49
Gambar 10. Memperkenalkan Budaya Sumpit	50
Gambar 11. Tampilan Opac	55
Gambar 12. Kartu Kataloog	56
Gambar 13. Jalur Khusus Disabilitas	58
Gambar 14. Kunjungan ke Mesjid Raya	60
Gambar 15. Tampilan Aplikasi ISumbar Mambaco	62

LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Wawancara BAB 1	68
Lampiran 2. Hasil Wawancara BAB 1	69
Lampiran 3. Format Wawancara BAB II	71
Lampiran 4. Hasil Wawancara BAB II	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan perpustakaan merupakan salah satu upaya untuk turut membangun masyarakat yang intelektual di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Perpustakaan dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan perpustakaan harus bisa menyesuaikan perkembangan teknologi informasi saat ini. Karena perpustakaan merupakan pusat segala jenis informasi yang berhubungan dengan proses kegiatan belajar mengajar. Pada dasarnya perpustakaan adalah lembaga penyelenggara kegiatan layanan informasi, pendidikan, dan rekreasi bagi masyarakat. Perpustakaan berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Keberadaan perpustakaan akan memperluas cara berfikir masyarakat, mendukung prakarsa dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan. Keberhasilan sebuah perpustakaan dapat ditinjau dari keberhasilan dalam menyediakan informasi bagi pengguna berdasarkan tinggi rendahnya kemampuan perpustakaan tersebut dalam melaksanakan fungsinya sebagai pusat kegiatan belajar mandiri serta pusat pelayanan informasi dan rekreasi bagi masyarakat. Perpustakaan perlu dikelola menurut sistem dan ketentuan umum yang berlaku, di samping pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan, dengan melibatkan semua komponen yang ada baik pemerintah maupun masyarakat yang bersangkutan.

Perpustakaan tumbuh di tengah masyarakat dan menjadi bagian besar dalam perkembangan sosial masyarakat. Perpustakaan terdiri dari beberapa jenis, salah satu jenis perpustakaan yaitu perpustakaan umum. Perpustakaan umum menurut UUD RI No 43 Tahun 2007 yaitu perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Perpustakaan umum dapat digunakan sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyediakan jasa dan membantu keberhasilan sebuah penelitian. Perpustakaan umum yang meliputi perpustakaan daerah memiliki peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, diharapkan pengembangan perpustakaan daerah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencerdaskan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 2 dijelaskan bahwa perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Berdasarkan asas perpustakaan di atas, perpustakaan sangatlah dekat dengan kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat. Begitu pula perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dijadikan sebagai wadah kegiatan masyarakat dan berbagai komunitas yang ada di masyarakat. Maka, hal ini sesuai dengan fungsi perpustakaan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 3:

“Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa”, terutama pada fungsi sebagai wahana pendidikan, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Namun, dengan begitu banyaknya fungsi perpustakaan, masih dijumpai beberapa stigma masyarakat yang membuat perpustakaan tersebut tidak dipandang baik dan dianggap sebagai tempat yang tertinggal oleh kemajuan teknologi. Selain itu, masyarakat sendiri juga kurang menyadari bahwa perpustakaan dapat mereka jadikan sebagai tempat mereka menggali ilmu dan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Serta juga bisa dijadikan sebagai wadah bagi mereka untuk menunjukkan, memamerkan atau memasarkan apa yang mereka hasilkan melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial yang telah ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Dari penjelasan di atas muncullah beberapa permasalahan harus diselesaikan dan diluruskan demi mengharumkan nama perpustakaan di kalangan masyarakat sosial.

Pertama, seperti yang dikatakan oleh salah satu pustakawan yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat pada saat penulis melakukan observasi pada tanggal 03 Juli 2023, perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat masih tidak terlepas dari pandangan buruk masyarakat, dimana mereka masih berfikir bahwa perpustakaan merupakan tempat yang membosankan, mereka hanya datang ketika mereka ingin

mengetahui beberapa informasi saja, bahkan semenjak berkembangnya teknologi, masyarakat semakin enggan untuk datang ke perpustakaan. Hal itu sangat dirasakan oleh pustakawan yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dan dibuktikan dengan sedikitnya jumlah pengunjung. Padahal fungsi perpustakaan sendiri sangat banyak, diantaranya dapat mereka jadikan sebagai tempat untuk mereka menggali ilmu serta juga bisa dimanfaatkan untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan diri.

Kedua, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat pada saat melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama satu bulan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat masih sangat kurang menyadari akan adanya fasilitas yang disediakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, seperti halnya dengan perpustakaan yang telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dengan kelas-kelas gratis yang disediakan dapat membantu mereka dalam meningkatkan kesejahteraan, jika sungguh-sungguh dipelajari dan diterapkan. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya kehadiran peserta dari setiap kelas yang diadakan yaitu dengan rata-rata yang menghadiri setiap kegiatan tersebut hanya berjumlah 5-7 orang, bahkan ada yang hanya berjumlah kurang dari 5 orang saja yang menghadiri kegiatan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Yelvi Oktavia selaku pengelola layanan perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera

Barat ini, mulai menerapkan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu pada tahun 2020, namun program tersebut sempat terhenti dikarekan oleh wabah *Covid-19* yang menyerang seluruh penjuru dunia. Program tersebut kembali dimaksimalkan pada tahun 2022 hingga sekarang. Dengan disediakanya beberapa kelas kegiatan. Adapun beberapa kegiatan tersebut antara lain: kelas menjahit, kelas merajut, kelas berkisah, kelas *beauty* atau kelas kecantikan, kelas tahsin hingga kelas bahasa asing (Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang). Kegiatan-kegiatan di atas dilakukan sebagai bentuk Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Dengan diadakannya beberapa kelas kegiatan di atas diharapkan mampu mengubah stigma masyarakat terhadap perpustakaan, dan juga diharapkan melalui kegiatan yang telah disediakan oleh perpustakaan bisa membantu masyarakat dalam mengasah serta mengembangkan kemampuan diri yang dimiliki, serta meningkatkan literasi pada masyarakat. Selain itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, maka dibuatlah makalah Tugas Akhir ini dengan judul “Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diadakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat? (2) bagaimana mendapatkan layanan

perpustakaan secara menyeluruh di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat? (3) bagaimana aksesibilitas informasi dalam mendukung berjalannya kegiatan inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat?.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diadakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat? (2) bagaimana mendapatkan layanan perpustakaan secara menyeluruh di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat? (3) aksesibilitas informasi dalam mendukung berjalannya kegiatan inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat?.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan makalah Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi: (1) bagi penulis, untuk menambah pengetahuan serta memperluas wawasan dari penulis, karena melalui pembuatan makalah ini penulis akan lebih memahami bahwa perpustakaan itu tidak hanya selalu berkaitan dengan buku-buku, melainkan juga bisa sebagai tempat untuk mengasah bakat dan kemampuan diri serta juga bisa sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup; (2) bagi masyarakat, melalui kegiatan ini mereka dapat belajar dan memparaktekkan ilmu yang mereka miliki dengan didampingi oleh ahli yang didatangkan atau yang di undang langsung oleh perpustakaan; (3) bagi

Perpustakaan, dengan diadakannya kegiatan-kegiatan tersebut, tentu perpustakaan ini akan dilirik oleh berbagai kalangan, baik itu dari para pelajar, maupun masyarakat yang berada di daerah tersebut. selain itu hal ini juga dapat merubah pandangan masyarakat mengenai perpustakaan sebagai tempat yang membosankan. Perpustakaan akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk dapat mengeksplor dan memasarkan kelebihan diri yang mereka miliki.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hakikat Perpustakaan

a. Definisi Perpustakaan

Menurut Prastowo (2012: 41) kata perpustakaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar pustaka, yang memiliki arti (1) kitab, atau buku-buku, (2) kitab primbon. Kata perpustakaan dalam bahasa Inggris, dikenal dengan *library*. Perpustakaan dalam bahasa Belanda disebut *bibliotheca*. Kata *bibliotheca* yang dapat diartikan dalam bahasa Yunani, *biblia*, yang artinya tentang buku, atau kitab. Sedangkan menurut Sutarno (2003: 8). Sebuah kata perpustakaan berasal dari kata pustaka yang berawalan per- dan berakhiran -an. Arti dari perpustakaan adalah: (1) himpunan buku-buku bacaan, (2) *bibliotek* (perpustakaan atau taman pustaka), dan (3) buku-buku ilmu pengetahuan, sejarah. Istilah dari kata perpustakaan adalah “pustakaloka” yang berarti tempat atau ruangan perpustakaan.

Prastowo (2012: 41) sebagai sebuah istilah perpustakaan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ruang, tempat, ataupun gedung yang didalamnya

memiliki aktivitas dalam pemeliharaan dan penggunaan koleksi bahan buku bacaan dan sebagainya. Arti lainnya, yaitu tempat penyimpanan koleksi buku, bahan pustaka, majalah dan lain yang dapat digunakan pengunjung untuk dibaca, dipelajari, dan dibicarakan. Pengertian perpustakaan menurut pandangan Sulistyio Basuki secara umum adalah bagian dari sebuah gedung biasanya digunakan untuk tempat penyimpanan buku dan lainnya yang terdapat pada sebuah ruangan dan di tata menurut susunan tertentu untuk menyediakan dan digunakan pembaca bukan untuk dijual.

Menurut Bafadal (2016: 3) perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya. Dari uraian tersebut pengertian perpustakaan ialah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pengelola dan pelestari karya tulis dan bahan pustaka lainnya, baik cetak maupun noncetak, menurut teknik dan aturan tertentu sebagai sarana penyebaran informasi, sarana pendidikan dan rekreasi masyarakat.

Berdasarkan dari pengertian perpustakaan menurut beberapa para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah suatu tempat ruangan atau gedung yang merupakan bagian dari suatu lembaga atau badan yang memiliki tugas menyediakan, menghimpun, dan mengelola bermacam koleksi buku. Bermacam-macam buku koleksi perpustakaan yang disediakan baik berupa buku-buku maupun tidak berupa buku seperti majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.

Berbagai koleksi buku tersebut disusun dan diatur secara sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk mencari buku. Buku sebagai media penghubung untuk mendapatkan sebuah informasi atau pengetahuan bagi pembaca sehingga perpustakaan dikatakan sebagai sumber informasi bagi setiap pembaca.

b. Jenis-jenis Perpustakaan

Menurut Sutarno (2006:38) jenis-jenis perpustakaan yang ada di Indonesia dan dikembangkan di Indonesia adalah: (1) perpustakaan nasional RI, yaitu perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia; (2) badan perpustakaan daerah, yaitu berkedudukan di tiap provinsi di Indonesia yang mengelola perpustakaan; (3) perpustakaan umum, merupakan lembaga pendidikan bagi masyarakat umum; (4) perpustakaan perguruan tinggi, yaitu perpustakaan yang berada di suatu perguruan tinggi; (5) perpustakaan sekolah, yaitu berada di sekolah dan dikelola oleh sekolah; (6) perpustakaan khusus, yaitu perpustakaan tersebut diadakan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang berkaitan; (7) perpustakaan lembaga keamanan, yaitu perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh lembaga-lembaga keamanan; (8) perpustakaan internasional, yaitu perpustakaan yang memiliki koleksi yang menyangkut negara-negara anggota atau negara-negara yang berafiliasi kepada lembaga dunia tersebut; (9) perpustakaan kantor perwakilan negara-negara asing; (10) perpustakaan pribadi; yaitu perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan; (11) perpustakaan digital, yaitu perpustakaan yang sudah diubah bentuk fisiknya menjadi digital atau sudah dialih mediakan.

Sementara itu Rochman (2016:281) juga mengemukakan jenis perpustakaan antara lain: (1) perpustakaan nasional; (2) perpustakaan umum; (3) perpustakaan khusus; (4) perpustakaan sekolah; (5) perpustakaan perguruan tinggi; (6) perpustakaan kelembagaan; (7) perpustakaan pribadi.

Fatimah (2018:32) juga mengemukakan jenis perpustakaan yaitu: (1) perpustakaan nasional, yaitu perpustakaan yang dikelola pemerintah pada tingkat nasional dan berfungsi sebagai perpustakaan nasional; (2) perpustakaan umum, yaitu perpustakaan yang dibiayai dari dana umum, baik sebagian atau seluruhnya, terbuka untuk masyarakat umum tanpa membeda-bedakan usia, jenis kelamin, kepercayaan, agama, ras, pekerjaan, keturunan, serta memberikan layanan cuma-cuma untuk umum; (3) perpustakaan sekolah, anak dan remaja, yaitu perpustakaan yang berada di sekolah dengan fungsi utama membantu tercapainya tujuan sekolah serta dikelola oleh sekolah yang bersangkutan. Mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan atas; (4) perpustakaan perguruan tinggi, yaitu perpustakaan yang ada di bawah pengawasan dan dikelola oleh perguruan tinggi dengan tujuan utama membantu perguruan tinggi tersebut mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan terdiri dari berbagai jenis, yang mana setiap jenisnya mempunyai fungsi tersendiri. Setiap jenis perpustakaan melayani kelompok masyarakat yang berbeda satu sama lain. Seperti perpustakaan umum yang terbuka untuk masyarakat luas, dan menyediakan koleksi yang dibutuhkan oleh masyarakat, perpustakaan sekolah,

yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh setiap sekolah guna menunjang proses pembelajaran di sekolah tersebut, perpustakaan perguruan tinggi menyediakan koleksi yang dibutuhkan oleh civitas akademis guna untuk mencapai tujuan dari perguruan tinggi tersebut dan sebagainya.

c. Layanan Perpustakaan

Menurut Ayuningtyas (2015: 13) layanan perpustakaan didefinisikan sebagai layanan yang diberikan oleh perpustakaan sehubungan dengan pemanfaatan koleksi yang ada di perpustakaan. Kegiatan layanan perpustakaan pada dasarnya mengandung pengertian penyebarluasan informasi dan bahan pustaka kepada pengguna. Menurut Luthfiah (2015: 192) melalui pelayanan perpustakaan pemustaka dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara optimal dari berbagai media dan manfaat dari berbagai alat bantu penelusuran yang tersedia. Tujuan utama pelayanan yang diberikan perpustakaan yaitu membantu pemustaka menemukan literature atau informasi yang diperlukan sehingga pemustaka dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi yang dimiliki perpustakaan.

Sedangkan menurut Rahmah (2018: 3) mengatakan layanan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan teknis yang pada pelaksanaannya perlu adanya perencanaan dalam penyelenggaraannya. Fungsi layanan perpustakaan adalah mempertemukan pemustaka dengan bahan pustaka yang mereka minati. Dalam rangka menciptakan kegiatan layanan perpustakaan yang baik diperlukan unsur-unsur penunjang yang mendukung kelancaran kegiatan layanan di perpustakaan, antara lain pemustaka (pengguna), koleksi, pustakawan, dana, sarana, dan

prasarana. Layanan perpustakaan adalah pemberian informasi dan fasilitas kepada pemustaka dan melalui layanan itu pemustaka dapat memperoleh informasi yang dibutuhkannya secara optimal dari berbagai media. Dalam memenuhi kebutuhan penggunaannya, perpustakaan umum memiliki beberapa jenis pelayanan di antaranya yaitu layanan pendidikan pemakai.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa layanan perpustakaan merupakan bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan koleksi atau pemanfaatan jasa yang ada di perpustakaan untuk kepentingan pemustaka.

2. Perpustakaan Umum

a. Definisi Perpustakaan Umum

Menurut Sutarno (2006: 43) perpustakaan umum merupakan lembaga pendidikan bagi masyarakat umum dengan menyediakan berbagai informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya sebagai sumber belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Saleh (2011: 9) Secara khusus perpustakaan umum berperan dalam pendidikan seumur hidup di masyarakat (life-long education atau life-long learning). Perpustakaan umum secara luas adalah tempat atau lokasi yang menghimpun koleksi buku, bahan cetakan serta rekaman lain untuk kepentingan masyarakat umum. Perpustakaan umum juga dapat diartikan sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat umum dengan menyediakan berbagai macam informasi ilmu

pengetahuan, budaya dan teknologi untuk meningkatkan dan memperoleh pengetahuan bagi masyarakat luas.

Sedangkan pada standar yang ditetapkan oleh Perpustnas RI pada tahun 2011 tertulis bahwa perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diperuntukkan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat (Zen dan Wuryani 2011). Lebih lanjut, perpustakaan umum memberikan layanan tanpa memandang ras, kebangsaan, usia, jenis kelamin, agama, bahasa, difabel, status sosial, dan ekonomi IFLA (2010).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang tidak membedakan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Dengan adanya pelayanan ini nantinya akan memudahkan masyarakat untuk mencari dan menemukan informasi yang dibutuhkan.

b. Fungsi Perpustakaan Umum

Setiap instansi pemerintah maupun non pemerintah tentunya memiliki fungsi yang nantinya bisa mencapai tujuan yang lebih baik tak terkecuali dengan perpustakaan umum. Ada beberapa fungsi yang harus ada demi terciptanya kenyamanan bagi masyarakat. Suwarno (2009: 42) mengatakan bahwa fungsi perpustakaan umum terdiri dari fungsi pendidikan dan pembelajaran, informasi, penelitian, rekreasi dan preservasi.

Menurut Taslimah Yusuf (1996: 21) perpustakaan umum memiliki beberapa fungsi yaitu, (1) fungsi edukatif, fungsi ini merupakan bentuk penyediaan bahan

pembelajaran yang tersaji dalam berbagai bentuk media digunakan sebagai bahan dalam menambah ilmu pengetahuan; (2) fungsi informatif, perpustakaan umum merupakan tempat pusatnya informasi, dimana perpustakaan umum menyediakan berbagai bentuk bahan referensi serta data-data penting yang diperlukan masyarakat; (3) fungsi rekreasi, perpustakaan umum tidak hanya bertumpu pada bahan bacaan ilmiah saja, tetapi perpustakaan harus bisa memposisikan dirinya sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat yang dapat menumbuhkan kreativitas dan dapat dijadikan sebagai tempat untuk mengisi waktu luang; (4) fungsi kultural, dalam hal ini perpustakaan umum sebagai penyedia bahan pustaka baik itu dari masa lampau, masa kini dan sebagai pengembangan kebudayaan dimasa mendatang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari perpustakaan umum dilaksanakan dengan memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tanpa adanya perbedaan pelayanan yang nantinya dapat merubah keterampilan, kemampuan dan sikap ke arah yang lebih maju.

3. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

a. Definisi Inklusi Sosial

Konsep inklusi sosial datang dari suatu istilah yang disebut dengan eksklusi sosial yang berarti di mana kondisi suatu masyarakat yang merasa dirinya berbeda dengan masyarakat lainnya. Lebih lanjut, Power & Wilson (2000) menjelaskan hal tersebut adalah mengenai ketidakmampuan dari suatu kelompok ataupun individu untuk menjaga diri mereka agar bisa berbaur dengan masyarakat umum.

Mereka cenderung memisahkan diri dari masyarakat umum merasa tidak tergolong dari masyarakat umum atau merasa eksklusif. Lebih lanjut, eksklusif sosial bisa datang dari berbagai faktor, misalnya warna kulit yang berbeda, suku, ras, agama, status sosial dan ekonomi seseorang atau masyarakat, yang efeknya mencegah mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat (Charity Commission, 2011; Noor, 2019).

Hal tersebut yang membuat konsep baru muncul berupa inklusi sosial. Konsep ini membangun masyarakat agar semakin terbuka dengan masyarakat lainnya, meningkatkan partisipasi mereka dalam masyarakat. Cara ini dilakukan melalui peningkatan peluang, akses ke sumber daya, dan rasa hormat bagi mereka (Leonir, 1974 (dalam Warsilah, 2015; (UNDESA, 2016).

b. Definisi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Menurut Yusuf Abdul Aziz (2023) Perpustakaan berbasis inklusi sosial (PBIS) adalah penguasaan literasi masyarakat. Dengan meningkatkan literasi masyarakat, diharapkan masyarakat akan mendapatkan kebutuhan akan informasi, pengetahuan dan mengasah keterampilan yang dimiliki sesuai dengan konteksnya masing-masing. Adapun fokus dari perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah program transformasi ilmu pengetahuan dan pembelajaran sepanjang hayat. Dimana lewat program ini masyarakat tidak sekedar melek literasi, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut Abdurrahman Misno (2020) Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan upaya meningkatkan akses kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, sehingga terjadi proses belajar yang mendorong kreatifitas dan inovasi agar menjadi produktif, bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan inklusif ini perpustakaan mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh semangat baru dan solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Deklarasi World Summit of Information (WSIS) tahun 2003 dalam artikel Woro Titi Haryanti (2019) menyatakan bahwa membangun masyarakat yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup.

Menurut Woro Titi Haryanti (2019) perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang proaktif membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial. Perpustakaan juga mendukung komunitas, orang dewasa dan keluarga untuk belajar di perpustakaan. Perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan

kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia dapat dikatakan perpustakaan tersebut sudah berbasis inklusi sosial.

Dapat disimpulkan bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah upaya dalam mengembangkan kemauan masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Melalui pendekatan inklusi ini perpustakaan mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh semangat baru dan solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

c. Inklusi Sosial di Perpustakaan

Menurut Woro Titi Haryanti (2019: 117) peran perpustakaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan untuk membangun konsep inklusi sosial pada perpustakaan sebagai berikut: (a) ketersediaan dan kemudahan akses bahan pustaka dan sumber informasi bermutu untuk masyarakat; (b) Masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan untuk berbagi pengalaman dan melatih keterampilan agar peroleh keahlian dan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan; (c) Perpustakaan menjadi ruang sinergitas kegiatan kemasyarakatan di daerah, agar manfaat dan dampak perpustakaan di masyarakat lebih optimal.

Menurut Malawa (2019) transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tersebut dapat diwujudkan dalam beberapa peran, yaitu: (a) perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat dan pusat kebudayaan; (b) perpustakaan dirancang lebih berdayaguna bagi masyarakat; (c) perpustakaan

menjadi wadah untuk menentukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat; (d) perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Sedangkan menurut Reza Mahdi (2020: 207-209), perwujudan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial di perpustakaan harus dilakukan dengan kerjasama yang baik antara perpustakaan dan masyarakat. Ini dikarenakan luaran dari konsep tersebut adalah menjadikan perpustakaan sebagai pusat aktivitas masyarakat secara beragam. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam membangun konsep inklusi sosial pada perpustakaan sebagai berikut: (1) adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat; (2) hak mendapatkan layanan perpustakaan; dan (3) aksesibilitas informasi perpustakaan.

1. Adanya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Utami dan Prasetyo (2019) mengatakan, perpustakaan umum yang menekankan pada konsep inklusi sosial, menjadikannya sebagai media bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi diri. Jadi, perpustakaan yang berbasis inklusi sosial tidak hanya menyediakan buku untuk membaca saja, namun juga menjadikannya sebagai ruang untuk berkarya dan berkegiatan bagi masyarakat (*makerspace*). Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa upaya yaitu:

a) Kegiatan Untuk Mengembangkan Potensi Diri

Menurut Salam (2018) upaya perpustakaan dalam menyelenggarakan kegiatan untuk masyarakat dalam mengembangkan potensi diri misalnya

pelatihan menulis, wirausaha, memasak, menjahit dan lain-lain, ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Masyarakat ditingkatkan kinerja dalam melakukan pengembangan diri demi menuju masa depan yang lebih baik.

Selain itu Menurut Mahdi (2020) koleksi bahan bacaan di perpustakaan juga bisa menjadi media bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka masing-masing. Dengan demikian, pengadaan koleksi perpustakaan dilakukan dengan mencerminkan kondisi masyarakat sekitar serta melihat dari permintaan masyarakat.

b) Aspek Pustakawan

Baba dan Abrizah (2018) menuliskan bahwa dalam melakukan revitalisasi fungsi perpustakaan sebagai media pemberdayaan masyarakat, aspek yang perlu diperhatikan yaitu dari segi pustakawan itu sendiri, bagaimana mereka memberikan pengaruh bagi masyarakat menjalin semacam relasi maupun kerja sama dalam membuat suatu program. Kemitraan bisa dilakukan dengan masyarakat lokal dengan pemerintah maupun swasta demi berdayanya suatu masyarakat. Pemanfaatan sumber daya yang ada di suatu masyarakat bisa mempengaruhi jalannya pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat yang ada di perpustakaan dapat menimbulkan partisipasi masyarakat secara penuh dalam mewujudkan kota atau daerah yang inklusif.

Sedangkan bagi masyarakat difabel, telah ditulis dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 40 Ayat 2, yaitu masyarakat difabel disiapkan fasilitas untuk berpartisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan

pengembangan sosial (Maftuhin, 2017). Hal tersebut juga bisa diterapkan untuk golongan masyarakat lainnya, seperti masyarakat taraf ekonomi rendah, serta masyarakat minoritas lainnya yang ingin belajar dan melakukan pengembangan diri dengan suatu lembaga yang menyediakan fasilitas dan sarana untuk mereka.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang membuat masyarakat terampil dan terdidik dalam berkegiatan. Melalui kegiatan tersebut keberadaan perpustakaan umum susatu daerah berperan dalam memberdayakan masyarakatnya, serta menjadikan perpustakaan umum tersebut sebagai sarana belajar sepanjang hayat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, ras, agama, adat maupun keterbatasan fisik (disabilitas).

2. Mendapatkan Layanan Perpustakaan Secara Menyeluruh

Maftuhin (2017) menuliskan perhatian terhadap hak masyarakat difabel dilakukan dengan memberikan mereka layanan dan fasilitas dalam mewujudkan kota atau daerah yang inklusif. Namun, untuk membangun kawasan yang inklusif, pemerintah atau masyarakat juga memperhatikan masyarakat berpotensi termarginal lainnya seperti status sosial, ekonomi, ras, etnis, umur, dan agama UNDESA (2016). Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan layanan dari lembaga atau masyarakat umum.

Tujuan layanan perpustakaan di samping agar bahan pustaka yang ada di perpustakaan dapat digunakan dengan optimal, juga agar kebutuhan informasi pemustaka dapat terpenuhi. Perpustakaan umum menjamin bahwa seluruh lapisan

masyarakat berhak mengakses fasilitas dan layanan di perpustakaan. Hal itu tidak hanya akses terhadap sumber informasi di perpustakaan, namun juga bisa meliputi hak masyarakat untuk berkegiatan di sana.

a) Akses Terhadap Sumber Informasi

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Masyarakat baik secara individu, maupun kelompok memiliki hak untuk mendapatkan layanan informasi. Jika informasi yang dibutuhkan tidak tersedia, maka sudah menjadi tugas perpustakaan untuk mencarikan informasi tersebut baik melalui pemanfaatan jaringan informasi atau kerjasama antar perpustakaan.

Menurut Rahayu (2015: 1.3) hakikat layanan perpustakaan adalah memberikan jasa informasi pada pemustaka yang berkaitan dengan: adanya bahan pustaka yang dibutuhkan pemustaka dan adanya alat penelusuran informasi yang digunakan. Adanya bahan pustaka yang dibutuhkan pemustaka yang dimaksud ialah perpustakaan harus melengkapi koleksi bahan pustaka serta mampu mencarikan solusi jika bahan pustaka yang dibutuhkan oleh pemustaka belum tersedia di perpustakaan tersebut. Perpustakaan merupakan salah satu lembaga penyedia informasi. Untuk itu perpustakaan harus mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemustakanya. Perpustakaan juga harus meningkatkan

layanannya agar kebutuhan informasi pemustaka dapat terpenuhi, mengingat kebutuhan informasi pemustaka yang semakin kompleks dan beragam.

b) Adanya Alat Penelusuran Informasi

Menurut Muin (2014: 85) penelusuran informasi merupakan bagian dari sebuah proses temu kembali informasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka dan informasi yang dibutuhkan dengan bantuan berbagai alat penelusuran dan temu kembali informasi yang dimiliki perpustakaan. Dengan kemajuan teknologi pada saat sekarang ini perpustakaan sudah bisa memakai komputer atau sering disebut dengan OPAC sebagai sarana penelusuran informasi di perpustakaan. Dengan adanya OPAC ini pengguna perpustakaan akan sangat terbantu dalam pencarian informasi karena pengguna bisa langsung mengetahui dimana buku atau informasi yang mereka cari berada dan pengguna juga bisa mengetahui apakah koleksi yang mereka butuhkan itu dipinjam oleh pengguna lain atau tidak.

Dalam peraturan perundangan secara tegas dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dalam memperoleh layanan dan pendayagunaan fasilitas perpustakaan. Hal ini juga berlaku untuk masyarakat disabilitas, dengan keterbatasan fisik maupun sosial serta masyarakat yang terisolasi dan terpencil. Pemerintah berkewajiban untuk menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan

Jika melihat pada konteks perpustakaan umum, pada Standar Nasional Perpustakaan Umum (2011) dituliskan secara garis besar bahwa perpustakaan

umum memberikan layanan tanpa membedakan seluruh jenis lapisan masyarakat. Lebih lanjut, IFLA (2010) juga menyatakan bahwa perpustakaan umum melayani seluruh masyarakat dengan setara tanpa membeda-bedakan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari perpustakaan, dan setiap orang juga memiliki hak untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh perpustakaan tanpa mendapatkan perlakuan yang berbeda.

3. Aksesibilitas Informasi Perpustakaan

Aksesibilitas yang dimaksud adalah kemudahan bagi seluruh masyarakat mengakses fasilitas di perpustakaan maupun informasi di sana. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perpustakaan dalam menunjang kemudahan mengakses fasilitas perpustakaan dan kebutuhan informasi dari pemustaka dan kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan diantaranya yaitu, akses jalan yang memadai, tersedianya perpustakaan keliling dan adanya layanan digital perpustakaan.

a) Akses jalan yang memadai

Sebagaimana yang terdapat pada UU No. 8 Tahun 2016 fasilitas yang disebutkan antara lain yaitu jalan, jembatan, transportasi, informasi umum, layanan publik yang terjangkau dari segi jarak dan biaya, serta layanan peradilan. Perpustakaan harus memperhatikan kemudahan mengakses jalan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang difabel, karena mereka memiliki keterbatasan fisik yang menyulitkan mereka dalam menggunakan fasilitas yang ada dan

mencari informasi yang dibutuhkan di perpustakaan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat jalur khusus orang difabel atau juga bisa dengan menggunakan lift atau elevator.

b) Tersedianya perpustakaan keliling

Menurut *Buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling* yang diterbitkan oleh perpustakaan nasional RI (2013:8) perpustakaan keliling adalah perluasan dari Perpustakaan Umum menggunakan sarana transportasi (kendaraan) baik darat maupun perairan, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang layanan tersebut guna menjangkau para pemustaka yang lokasinya di luar jangkauan layanan stasioner perpustakaan.

Bagi mereka yang eksklusi, selain masyarakat difabel, perhatian juga dilakukan terhadap akses terhadap fasilitas maupun layanan dari lembaga yang diperuntukan untuk masyarakat umum. Perpustakaan bisa memperhatikan hal tersebut misalnya dengan mengadakan perpustakaan keliling bagi masyarakat yang perekonomiannya rendah maupun difabel sehingga tidak dapat sewaktu-waktu pergi ke perpustakaan tetap. Mereka tetap bisa mencari informasi yang mereka butuhkan dengan adanya layanan perpustakaan keliling tersebut.

c) Adanya layanan digital perpustakaan

Aplikasi perpustakaan juga dapat berperan bagi masyarakat yang berlokasi jauh sehingga tidak mampu untuk pergi ke perpustakaan tetap Noor (2019). Dengan adanya layanan digital ini tentu lebih mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan. Bagi masyarakat difabel,

perpustakaan bisa menambahkan koleksi braille bagi tuna netra serta memperhatikan jalan akses bagi masyarakat tuna daksa atau cacat fisik lainnya.

Lebih lanjut, Utami dan Prasetya (2019) mengatakan, konsep inklusi sosial mengayomi seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan peluang, akses ke sumber daya dan rasa hormat bagi mereka serta melakukan pendekatan layanan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menggunakan perpustakaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan haruslah memberikan kemudahan dalam mengakses fasilitas di perpustakaan, dan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan, tanpa membedakan latar belakang dari setiap masyarakat pengguna.

d. Tujuan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Menurut, *Departemen for culture media and sport* (1999) perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Asasi Manusia.

Woro Titi Haryanti (2019) mengatakan tujuan kebijakan perpustakaan berbasis inklusi sosial menurut yaitu: (1) untuk meningkatkan literasi informasi berbasis TIK; (2) meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; (3) memperkuat peran dan fungsi perpustakaan agar perpustakaan tidak hanya

sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi juga menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Helmi Supriyatno (2020) program perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan literasi meningkat yang berujung peningkatan kreativitas masyarakat dan menipiskan kesenjangan akses informasi. Serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap perpustakaan. Melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial masyarakat dapat memandang perpustakaan sebagai sebuah tempat belajar sepanjang hayat dan berkegiatan yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung dan secara luas. Dengan demikian diharapkan bahwa pandangan lama terhadap perpustakaan dapat berangsur-angsur berubah.

4. Implementasi

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* berarti mengimplementasikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah suatu pelaksanaan ataupun penerapan. Menurut Pranata Wastra, Dkk dalam Dewi Yuni Lestari, dkk implementasi adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan. Siapa yang

melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut M. Joko Susilo implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learner Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak). Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas tersebut, dapat dijelaskan bahwa implementasi adalah bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Syukur dalam Surmayadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana (*implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan penerapan sesuatu yang telah dirancang atau dibuat secara matang, sehingga pengerjaannya dapat dilakukan dengan penuh keyakinan dan tujuan yang jelas.

F. Metode Penulisan

a. Jenis Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Menurut Sukmadinata (2017: 72) penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan fenomena yang ada, baik fenomena alami maupun fenomena buatan manusia bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan lainnya.

b. Obyek Kajian

Salah satu yang penting dalam suatu penelitian adalah adanya suatu obyek kajian. Adapun obyek kajian dalam penulisan ini adalah Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Jalan Diponegoro No.4 Padang (Perpustakaan Provinsi) dan Jalan Pramuka V No. 2 Khatib Sulaiman Padang (Kearsipan)

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan

adalah (a) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung pada responden untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang telah dibahas sebelumnya dalam penulisan makalah tugas akhir ini. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai salah satu pengelola perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat yang bernama Ibu Yelvi Oktaviani, S. IP selaku sub koordinator di bagian pelayanan perpustakaan. (b) Dokumentasi, adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian sebagai data pelengkap berupa catatan-catatan, transkrip, buku, agenda, arsip dan sumber lainnya untuk melengkapi data primer yang diperoleh langsung dari responden. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan memperkuat hasil observasi dan wawancara dalam bentuk berupa tulisan, gambar, dan sebagainya (mengacu pada pendapat Mardawati). (c) Studi Kepustakaan, selain wawancara dan dokumentasi, penelitian ini memiliki data pendukung atau biasa disebut data sekunder. Data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel terkait. Data sekunder juga diperoleh dari internet dan e-book terkait dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan bagaimana mengimplementasikannya.

Tabel 1. Kisi-kisi Wawancara

No	Variabel	Indikator
1	Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat	a. Kegiatan untuk mengembangkan potensi diri 1) Kelas <i>beauty</i> (kecantikan) 2) Kelas tahsin 3) Kelas bahasa Inggris 4) Kelas menjahit 5) Kelas merajut 6) Kelas bahasa Jepang b. Aspek Pustakawan
2	Hak mendapatkan layanan perpustakaan secara menyeluruh	a. Akses terhadap sumber informasi 1) Adanya bahan pustaka yang dibutuhkan pemustaka 2) Adanya alat penelusuran informasi yang digunakan b. Hak masyarakat untuk berkegiatan
3	Aksesibilitas informasi perpustakaan	a. Kemudahan dalam mengakses fasilitas perpustakaan 1) Akses jalan yang memadai 2) Tersedianya perpustakaan keliling 3) Adanya layanan digital perpustakaan

d. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam pembuatan makalah tugas akhir ini adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, Peneliti berusaha untuk memaparkan dan mendeskripsikan pemecahan suatu permasalahan yang berdasarkan pada data-data yang diperoleh saat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai: (1) kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang diadakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari indikator kegiatan pengembangan potensi diri dan juga dari aspek pustakawan; (2) bagaimana mendapatkan layanan perpustakaan secara menyeluruh di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari indikator akses terhadap sumber informasi dan adanya alat penelusuran informasi; (3) aksesibilitas informasi dalam mendukung berjalannya kegiatan inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari indikator akses jalan yang memadai, tersedianya perpustakaan keliling dan adanya layanan digital perpustakaan.